

MEMINIMALISASI KONFLIK ANTARA PENDUKUNG DUA KUBU CALON PRESIDEN DALAM PILPRES 2019

Lukman Nul Hakim

Abstrak

Proses panjang pemilihan Presiden Republik Indonesia 2019 telah mendekati titik akhir. Harapannya polarisasi yang terjadi dalam rentang waktu setahun terakhir segera berakhir. Namun demikian konflik antara kedua kubu masih terus terjadi. Sindiran dan silang pendapat masih mewarnai laman-laman media massa maupun media sosial. Tulisan ini mengkaji langkah-langkah strategis yang harus dilakukan agar akselerasi rekonsiliasi nasional dapat segera terwujud. Menurut teori psikologi sosial, konflik bisa terjadi karena persepsi keadilan yang tidak terpenuhi, komunikasi yang buruk para politisi, dan adanya mindset in-group out-group. Beberapa hal yang dapat dilakukan DPR RI adalah, memaksimalkan fungsi pengawasan Komisi II DPR RI kepada ketiga lembaga penyelenggaraan pemilu untuk bekerja profesional dan transparan. Kemudian Komisi I juga perlu mendorong Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan Pers agar pers nasional netral pada saat pilpres. Terakhir cara penanganan konflik terbaik adalah penanaman super ordinate goal dalam benak para elit politik dan masyarakat, yaitu untuk mengutamakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia..

Pendahuluan

Pada tanggal 17 April 2019 Bangsa Indonesia telah berhasil membangun tonggak sejarah dengan terselenggaranya Pemilihan Umum (Pemilu) serentak yang banyak disebut sebagai Pemilu paling kompleks di dunia. Pemilu ini disebut kompleks karena setiap pemilih datang ke tempat pemilihan suara (TPS) untuk

mencoblos sebanyak 5 surat suara yaitu untuk memilih calon presiden, calon anggota DPR RI, calon anggota DPD RI, calon anggota DPR Provinsi dan calon anggota DPR kabupaten/kota. Selain itu pemilu ini juga melibatkan 193 juta pemilih, dengan total jumlah panitia yang hampir sama dengan total penduduk Negara Singapura yaitu 6 juta orang, dan Pemilu yang



dengan segala kerumitannya dapat selesai hanya dalam satu hari.

Selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Hasil rekapitulasi menunjukkan bahwa calon nomor urut 1 Joko Widodo-Ma'ruf Amin menang dengan perolehan suara sebanyak 85.607.362 atau 55.50%. Sedangkan perolehan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto - Sandiaga Salahudin Uno sebanyak 68.650.239 atau 44.50%. Setelah pengumuman ini kemudian akan dilanjutkan dengan masa pengajuan sengketa antara 23 Mei-15 Juni 2019. Akhirnya pada tanggal 20 Oktober 2019 akan dilakukan sumpah dan janji pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Republik Indonesia. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 20 Oktober 2019 akan menjadi titik akhir dari perjalanan panjang proses Pilpres yang dimulai secara resmi sejak tanggal 10 Agustus 2018, yaitu saat kedua calon pasangan mendaftarkan diri sebagai pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.

Idealnya setelah berakhirnya proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tersebut maka akan berakhir pula polarisasi di masyarakat. Akan tetapi berdasarkan pengamatan pada judul-judul berita media massa dan postingan di media sosial terlihat bahwa kondisi saat ini (hari penetapan pemenang Pilpres) menunjukkan bahwa ketegangan antara kedua kubu masih tinggi. Media massa menampilkan berita seperti akan terjadi aksi *people power*, yaitu penggunaan massa

(rakyat) untuk mendesakkan perubahan politik. Harian Kompas.com edisi 16 Mei 2019 memuat berita berjudul "Kiai dan Pendekar Madiun Doakan Pendukung "People Power" Dapat Hidayah". Kompas.com juga menulis berita berjudul "Masyarakat Lamongan Peduli Negeri Unjuk Rasa Tolak Ajakan *People Power*". Hasil pengamatan tersebut menunjukkan bahwa rekonsiliasi setelah tanggal 20 Oktober 2019 tidak akan berjalan cepat dan lancar jika tidak dilakukan berbagai langkah aktif untuk menetralkan ketegangan antara kedua kubu. Tulisan ini berupaya mengkaji langkah-langkah strategis yang harus dilakukan agar akselerasi rekonsiliasi nasional dapat segera terwujud.

Mencari Akar Masalah

Kompetisi antara kubu 01 dan 02 menghadirkan konflik-konflik baik besar maupun kecil di tengah masyarakat. Mulai dari perdebatan di dunia maya seperti di *whatsapp group*, *facebook*, *twitter*, sampai dengan pertarungan di dunia nyata yang merenggut nyawa seperti yang terjadi di Madura. Menurut Baron & Byrne (2004) konflik merupakan sebuah proses di mana seseorang atau sekelompok orang mempersepsikan bahwa orang lain telah atau akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepentingannya. Terdapat beberapa elemen kunci dalam sebuah konflik yaitu (1) adanya kepentingan yang berlawanan, (2) menyadari adanya oposisi, (3) keyakinan bahwa pihak lain akan melakukan sesuatu untuk mengintervensi kepentingan mereka, (4) adanya tindakan intervensi. Saat ini keempat elemen

kunci terciptanya konflik ada pada kompetisi pilpres antara kubu 01 dan 02, sehingga terjadinya konflik merupakan sebuah keniscayaan.

Para peneliti psikologi telah berupaya memahami proses terjadinya konflik. Harapannya dengan pemahaman tersebut dapat dilakukan upaya meredam konflik. Berikut adalah beberapa temuan yang berguna untuk memahami kondisi konflik. Menurut Baron & Byrne (2004) konflik erat kaitannya dengan tidak terpenuhinya rasa keadilan. Akan tetapi perlu ditekankan adalah bahwa penilaian keadilan tersebut adalah di mata orang tersebut (Greenberg, 1990), sehingga orang-orang yang berbeda bisa memiliki pertimbangan keadilan yang berbeda. Karakteristik rasa keadilan ini unik, yaitu yang sensitif terhadap rasa keadilan itu adalah orang yang dirugikan, sementara orang yang diuntungkan cenderung lebih tidak sensitif. Hal ini dikenal sebagai *self-serving bias*.

Konflik akan muncul ketika individu merasakan tidak adanya keadilan distributive (*distributive justice*), yaitu penilaian individu oleh apakah mereka telah mendapatkan perlakuan yang adil; keadilan prosedur (*procedural justice*) yaitu penilaian individu apakah prosedur yang diterapkan terhadap mereka sudah adil; dan yang terakhir keadilan interaksional (*interactional justice*) yaitu sejauh mana pihak yang terlibat dapat menjelaskan pilihan-pilihannya dengan rasional.

Konflik juga mudah terjadi ketika seseorang mempunyai pandangan yang mengkategorisasi sosial (*social categorization*), yaitu kecenderungan orang untuk

melihat dunia sosial atas dua yaitu “kami” dan “mereka” atau *mindset ingroup vs outgroup*. *In-group* adalah kelompok sosial di mana seseorang merasa dirinya adalah bagian dari kami. Sementara *out-group* adalah setiap kelompok selain kelompok di mana individu itu merasa berada. Orang dan pandangan yang masuk dalam kategori “kami” mendapatkan penilaian yang positif, sementara yang lainnya negatif. Sisi buruk dari kategorisasi sosial ini adalah terciptanya prejudis, yaitu sikap negatif terhadap anggota kelompok sosial tertentu. Yang menarik adalah prejudis merupakan hasil dari pembelajaran sosial. Yang berarti ada jalan untuk melakukan konter atas prejudis dengan memberikan pembelajaran yang baru.

Sementara Cropanzano (1993) mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi konflik adalah *faulty communication*, yaitu cara komunikasi yang salah. Kadang-kadang orang menyampaikan pesan dengan cara yang membuat orang lain terganggu dan marah, meskipun sesungguhnya dia tidak bermaksud demikian. Menurut Keltner & Robinson (1997) orang cenderung untuk mempersepsikan bahwa pandangannya pribadi adalah objektif dan sesuai realitas, sedangkan pandangan lawannya bersifat subjektif dan tidak sesuai realitas.

Berbagai temuan penelitian psikologi sosial seperti telah diuraikan diatas dapat digunakan untuk memahami kondisi konflik pilpres 2019 ini. Pada Pilpres 2019 ini kedua kubu, baik 01 maupun 02 mengatakan bahwa mereka di curangi. Ketua Tim Kampanye Nasional kubu 01 mengatakan

bahwa terdapat 25 ribu aduan tentang dugaan kecurangan yang merugikan calon presiden dukungannya. Sementara berbagai protes yang menuntut kejujuran KPU di sampaikan oleh kubu 02. Hal ini tergambar dari pernyataan juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) dari kubu 02 bahwa BPN siap adu data kecurangan dan KPU harus adil (Viva, 2019). Kondisi ini menggambarkan *mindset in-group* dan *out-group* dari kedua kubu yang melahirkan prejudis. Masing-masing pihak merasa dicurangi. Selain itu *faulty communication* juga merupakan aksi yang dipertontonkan oleh beberapa politisi dalam satu tahun terakhir. Cara komunikasi yang salah mengundang komunikasi yang salah lainnya sehingga menciptakan lingkaran setan yang tidak berujung.

Meminimalisasi Konflik

Dalam dunia di mana konflik semakin sering terjadi maka diperlukan langkah-langkah yang tegas untuk mengembangkan strategi baru untuk menyelesaikan konflik secara efektif. Untuk menetralisasi konflik pasca-Pilpres maka perlu adanya usaha bersama dari berbagai pihak baik itu bagi pejabat, *public figure*, media massa, dan masyarakat itu sendiri.

Bagi para pejabat, *public figure* dan media massa, langkah pertama yang harus dilakukan adalah untuk tidak lagi melakukan kategorisasi sosial sejak dalam pikiran. Para pejabat, *public figure*, redaksi media massa harus mengatur mindset bahwa baik kubu 01 maupun kubu 02 seluruhnya merupakan rakyat Indonesia.

Artikel-artikel yang ditulis media massa tidak lagi menggunakan mindset “saya” dan “mereka” atau *ingroup - outgroup*. *Mindset* yang dikotomis akan menghasilkan narasi yang dikotomis. Narasi yang dikotomis akan memecah belah dan menciptakan perselisihan dan prejudis. Karena pada prinsipnya setiap individu dapat menerima hasil yang mengecewakan jika mereka diperlakukan dengan bermartabat dan hormat (Tyler & Smith, 1997).

Terkait persepsi ketidakadilan maka upaya untuk menetralisasi permasalahan ini dapat dilakukan oleh KPU dengan memberikan *interactional justice*. KPU dapat memberikan penjelasan yang rasional dan transparan sehingga kesenjangan persepsi atas ketidakadilan dapat mengecil. Pilpres juga harus terbebas dari *faulty communication*, dari konten informasi yang salah dan penggunaan narasi yang salah. Karenanya penting bagi para *public figure* yang untuk mengontrol diksi yang disampaikan. Karena setiap orang harus menyadari bahwa apa yang disampaikan akan diterima oleh masyarakat dari berbagai lapisan dengan tingkat pendidikan dan tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Hal ini bukan dimaksudkan agar Negara menghalangi orang untuk berbicara, melainkan mendorong orang untuk berbicara yang baik dan tidak provokatif.

Langkah-langkah strategis yang harus dilakukan agar akselerasi rekonsiliasi nasional dapat segera terwujud adalah pertama pihak penyelenggara pemilu harus menunjukkan bahwa mereka telah

menjalankan tugas dengan adil dan profesional dengan cara transparan, menerima masukan dari kubu yang melakukan protes, dan mengoreksi jika memang melakukan kesalahan. Sementara dari kubu yang mengoreksi harus memberikan masukan dengan disertai bukti-bukti. Hal ini akan memberikan kepuasan sehingga memperkecil gap persepsi ketidakadilan. Dalam proses tersebut pihak-pihak terkait harus menjaga komunikasi yang baik dan santun.

Baron & Byrne (2004) juga menawarkan cara penanganan konflik yang paling efektif, yaitu dengan mendorong semua pihak melihat pada *super ordinate goal* atau tujuan besar bersama, yaitu target yang ingin dicapai negara.

Penutup

Dibutuhkan upaya yang komprehensif dari beberapa pihak untuk meminimalisasi konflik antara pendukung dua kubu calon presiden baik dalam pilpres 2019 maupun pilpres mendatang. Pertama adalah dengan menciptakan rasa keadilan bagi kedua kubu. DPR RI dapat mendorong transparansi dan profesionalitas kerja kepada 3 (tiga) mitra kerja Komisi II yang merupakan lembaga penyelenggara pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum RI (KPU), Badan Pengawas Pemilu RI (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI (DKPP). Komisi I DPR RI juga perlu mengawasi kinerja Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan Pers agar mendorong pers nasional yang netral agar kedua pihak merasakan keadilan. Selain itu anggota DPR RI juga perlu mendorong semua pihak agar mengejar *super ordinate goal*.

Pada konteks Indonesia maka *super ordinate goal*-nya adalah tercapainya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua pihak mulai dari elit politik, media massa maupun masyarakat luas harus menempatkan kepentingan utama di atas kepentingan pribadi dan kelompok.

Referensi

- Baron, R. A. (1989). "Personality and organizational conflict: Effects of the Type A behavior pattern and self-monitoring". *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, Vol. 44, No. 2, Pg. 281-296.
- Baron, R.A., & Byrne, D. (2004). *Social psychology*. 10th edition. New Delhi: Pearson Education.
- Cropanzano, R. (Ed.). (1993). *Justice in the workplace* (pp. 79-103). L. Erlbaum Associates.
- Greenberg, J. (1990). "Employee theft as a reaction to underpayment inequity: The hidden cost of pay cuts. *Journal of applied psychology*, 75 (5), 561.
- Keltner, D., & Robinson, R. J. (1997). Defending the status quo: Power and bias in social conflict. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 23 (10), 1066-1077.
- "Kiai dan Pendekar Madiun Doakan Pendukung "People Power" mendapat hidayah", <https://regional.kompas.com/read/2019/05/15/11291411/kiai-dan-pendekar-madiun-doakan-pendukung-people-power-dapat-hidayah>, diakses 16 Mei 2019.
- "Masyarakat Lamongan Peduli Negeri Unjuk Rasa Tolak Ajakan People Power",

<https://regional.kompas.com/read/2019/05/15/19363291/masyarakat-lamongan-peduli-negeri-unjuk-rasa-tolak-ajakan-people-power>, diakses 16 Mei 2019.

Tyler, T. R., & Smith, H. J. (1997). Social justice and social

movements. In D. Gilbert, S.T.Firks, & G. Lindzey (Eds.), Handbook of social psychology (Vol.2), 2nd ed., pp. 595-629. Newyork: McGraw-Hill.



Lukman Nul Hakim
lukman.nulhakim@dpr.go.id

Lukman Nul Hakim, S.Psi., MA., menyelesaikan pendidikan S1 Psikologi dari Universitas Indonesia pada tahun 2002 dan pendidikan S2 Master of Arts in Psychology dari University of Jamia Millia Islamia pada tahun 2007. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda Psikologi pada Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui buku dan jurnal antara lain: "Pengaruh Intensitas Mengikuti Informasi Terorisme terhadap Sikap Mengenai Terorisme" (2010), "Meningkatkan Kualitas Perguruan Tinggi Lokal melalui Internasionalisasi Pendidikan Tinggi" (2013), dan "Ulasan Konsep: Indijinuisasi Ilmu Psikologi" (2014).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.